

TAJUK RENCANA

Efektivitas Penanggulangan Scam

KORBAN kejahatan scam atau penipuan transaksi keuangan terus bertambah. Berdasar catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana yang dilaporkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), dalam tiga bulan terakhir, korban scam mengalami kerugian hingga Rp 700 miliar (KR 12/2). Dari jumlah tersebut, yang berhasil diblokir baru Rp 106, 8 miliar. Jumlah tersebut baru yang terpantau atau dilaporkan, boleh jadi secara riil jumlahnya lebih dari itu. Bila ini tidak segera diantisipasi cepat, kita khawatir korban akan terus bertambah.

Kita yakin pemerintah dalam hal ini OJK maupun Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menggandeng stakeholder guna memberantas segala bentuk penipuan transaksi keuangan berbagai modus, seperti pinjaman online (pinjol) ilegal, investasi bodong, tipu-tipu hadiah dan sebagainya. Pelaku beraksi dengan memanfaatkan platform digital. Karena itu, pemerintah juga telah berusaha mengatasi antara lain dengan memblokir atau mengeluarkan entitas ilegal yang merugikan konsumen.

Namun upaya tersebut nampaknya belum cukup. Kiranya tanggung jawab untuk menanggulangi scam atau penipuan transaksi keuangan bukan hanya dibebankan kepada OJK semata, melainkan juga BI, Kemkomdigi, Polri dan lembaga lainnya. Hemat kita, mengatasi kejahatan scam yang memanfaatkan teknologi digital, harus melibatkan banyak pihak. Sebab, pelaku kini makin canggih dan terus mencari cara untuk beraksi memperdaya konsumen atau masyarakat. Sebagai contoh, ketika akun mereka diblokir, akan bikin akun baru lagi dengan nama berbeda, begitu seterusnya.

Dari aspek regulasi, kita mendorong Bank Indonesia (BI) untuk memperketat regulasi sistem pembayaran guna mencegah transaksi ilegal serta memastikan keamanan

perbankan digital. Di samping itu, kita juga mendorong Kemkomdigi menggandeng Polri untuk melakukan patroli siber secara intensif dan menindak situs web atau aplikasi berbahaya yang terkait dengan scam. Langkah pemblokiran terhadap situs-situs berbahaya tersebut juga harus terus dilakukan, meskipun pelaku tak kurang akal dengan membuat situs dan wajah baru. Justru inilah tantangan yang harus dihadapi bersama.

Berkecenderungan itu, pemerintah, terutama Kemkomdigi harus mengintensifkan kerja sama dengan platform digital, seperti Google, Facebook maupun platform digital lainnya guna menanggulangi scam atau kejahatan digital lainnya, misalnya dengan cara menghapus iklan atau konten berbahaya yang mengandung scam atau penipuan. Bila kejahatan itu bersifat lintas negara, maka pemerintah harus menjalin kerja sama dengan Interpol atau lembaga internasional lainnya.

Hal penting lainnya yang perlu dilakukan pemerintah, OJK, BI, Kemkomdigi, Polri dan lembaga terkait adalah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sebab, harus diakui, selama ini tingkat literasi atau pemahaman masyarakat menyangkut kejahatan di ranah digital masih rendah. Akibatnya, selalu saja ada korban scam, phishing, investasi bodong, hingga penipuan berkedok hadiah.

Di sisi lain, masyarakat juga proaktif membentengi diri agar tidak menjadi korban kejahatan digital. Masyarakat hendaknya tidak mudah percaya dengan tawaran keuntungan yang menggiurkan yang sebenarnya tidak masuk akal. Akhirnya, mengatasi kejahatan digital, baik itu scam, phishing, pinjol ilegal, investasi bodong, harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai institusi.

Harapannya, tidak ada lagi korban penipuan transaksi keuangan digital. □ - d



KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia (RI) 14 Januari lalu menerbitkan Peraturan Menteri

Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat. Kata kunci utamanya adalah Redistribusi guru ASN, di mana ada ruang penunjukan bagi guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Definisi guru ASN saat ini terdiri atas guru PNS dan guru PPPK. Untuk guru ASN dapat didistribusikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sedang redistribusi guru ASN harus mempertimbangkan data kebutuhan guru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang diperoleh dari data pokok pendidikan yang ada pada Kementerian Pendidikan. Artinya, baik guru PNS maupun guru PPPK sejak dikeluarkan aturan di atas, dapat ditempatkan pada sekolah swasta dengan tata cara dan ketentuan yang diatur regulasi.

Mengenai mekanisme redistribusi guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kewenangan. Pelaksanaan redistribusi guru ASN dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan redistribusi guru ASN yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan terdiri atas unsur Dinas Pendidikan Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten atau Kota dan badan yang menangani urusan kepegawaian di daerah, sesuai dengan kewenangan.

Adapun jangka waktu redistribusi guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Ketentuan penilaian kinerja guru ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kewenangan berdasarkan rekomendasi penilaian pimpinan penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan ma-

Bramastia

syarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepedulian Pendidikan

Perubahan kebijakan pendidikan pada ranah guru memberi angin segar bagi penyelenggara pendidikan dari masyarakat. Sebab kebijakan sebelumnya, sesuai Undang-Undang (UU) ASN Nomor 5 tahun 2014, pemerintah menarik guru diperbantukan (DPK) yang sebelumnya telah mengajar di sekolah swasta, kembali ke sekolah negeri. Pasal dalam UU ASN menyebutkan, PNS diangkat pada instansi pemerintah, disamping dalih pe-



KR-JOKO SANTOSO

narikan karena anggaran pusat maupun daerahnya.

Bila dicermati, sesuai amanat UU ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang dinyatakan bahwa posisi pengabdian PNS adalah pada instansi pemerintah. Imbasnya, banyak penarikan guru PNS dari sekolah swasta karena pemerintah sering mengeluhkan kekurangan guru untuk sekolah negeri, sehingga guru PNS wajib mengisi kekurangan guru di sekolah negeri.

Bahkan, guru negeri yang diperbantukan di swasta harus kembali ke negeri dan kalau menolak, tentu ada sanksi tegas yang akan diberlakukan sesuai PP 53/2010 tentang Disiplin PNS. Salah satu dampak yang dirasakan secara langsung adalah tertundanya proses kenaikan pangkat dan Penetapan Pensiun Otomatis PNS, karena Sekolah Swasta tidak terdapat di Sistem Aplikasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Keadilan Pendidikan

Penulis mendukung pemerataan kualitas pendidikan yang memang harus menjadi prioritas di tanah air. Kebijakan redistribusi guru ASN ke sekolah swasta harus disertai data pemetaan terhadap kebutuhan guru setiap wilayah secara lebih akurat dan berkelanjutan, untuk memastikan guru ASN tidak hanya terkonsentrasi di sekolah swasta perkotaan. Artinya, redistribusi guru ASN harus diupayakan menjangkau daerah-daerah terpencil yang sekiranya sangat butuh guru atau tenaga pengajar berkualitas.

Kedua, redistribusi guru ASN harus disesuaikan kapasitas sekolah swasta. Jangan sampai redistribusi guru ASN tidak membawa imbas yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan suatu daerah. Hal ini harus menjadi perhatian supaya redistribusi ASN memberi manfaat yang bisa lebih merata terhadap akses pendidikan.

Ketiga, distribusi guru ASN hendaknya mengutamakan hak atas peserta didik. Harus dipahami, semua peserta didik, sekolah negeri maupun swasta, adalah anak-anak bangsa, yang mempunyai hak sama atas pendidikan, sehingga tidak boleh lagi ada dikotomi sekolah negeri dan swasta yang selama ini justru terlahir dari pemegang kebijakan pendidikan. Keempat, redistribusi guru ASN sebagai upaya membangun keadilan dalam pendidikan. Paradigma pemerintah yang selama ini dipandang lebih mengutamakan pemenuhan guru negeri dulu daripada guru swasta, harus diubah. Rekrutmen guru ASN baik melalui PNS dan PPPK tidak sebatas hanya untuk mengatasi kekurangan guru negeri, tetapi memenuhi kebutuhan guru di tanah air. (*)-d

**)Dr Bramastia MPd, Pemmerhati Kebijakan Pendidikan, Dosen Pascasarjana FKIP UNS Surakarta.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)

No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan: H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapikan kartu pers/surat tugas.

Redistribusi Guru ASN

Budaya "Ngajeni" Berbasis Kearifan Lokal



PENDIDIKAN

budaya lokal bagi anak pada dasarnya banyak manfaatnya. Di antaranya dapat mendidik pada rasa percaya diri, disiplin, menjauhkan rasa egois, memupuk rasa kebersamaan, melatih kerja sama, melatih kepekaan, saling menghargai, serta lebih jauh dengan membiasakan dalam kehidupan. Budaya "ngajeni" yang baru saja dicanangkan Dikpora Kabupaten Bantul 10 Februari 2025, dari akronim *ngapurancang, jempol, nuwun sewu/ nderek langkung, matur nuwun, nyuwun pangapunten* dan *ing-gih*, sekaligus implementasi Tujuh Kebiasaan Bantul Hebat program dari Kemendikdasmen, perlu diapresiasi, di tengah minusnya contoh teladan mendidik bagi anak di zaman sekarang.

Dalam pengejawantahan pembelajarannya difokuskan pada kemampuan pelajaran bermakna bagi siswa, sehingga diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia mempunyai dengan kemampuan adaptasi serta kompetensi yang baik. Untuk dapat meraih tujuan mulia ini memang tidak mudah, namun diperlukan adanya sebuah program terencana dan terpadu demi suksesnya bentuk pembelajaran. Salah satunya melalui pembelajaran seni budaya di sekolah sesuai tujuan utamanya, yakni untuk membentuk manusia yang berkepribadian tangguh, dan berada di masa datang. Dengan metode khusus ini, kiranya dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut melalui pengajarannya.

Meminjam istilah Umar Kayam yang dikutip Takdir Alisjahbana (1983), kreativitas adalah untuk memberi peluang bergerak, memelihara, menularkan serta mengembangkan budaya lokal (disesuaikan situasi zamannya) kepada siswa didik. Bagaimana cara membina, memanfaatkan, salah satunya melalui nilai pendidikan berbasis *local wisdom* (kearifan lokal) sesuai dengan ajaran Ki

Danan Murdyantoro

Hadjar Dewantara, konteks pendidikan harus kembali ke khitahnya di mana proses pembudayaan dan peradaban mesti dikedepankan (Syaiful Her-mawan, 2021).

Daya dukung sekolah dengan "kreativitas" guru dalam pengajaran seni budaya di dalam praktiknya sangat diperlukan. Guru sebagai mampu, dalam pengajarannya perlu memetakan beberapa hal sebagai berikut, di antaranya: 1) ; pilihan/materi ajar harus menarik bagi siswa. 2) ; guru harus menguasai materi yang diajarkan. 3); kalau bentuk seni pertunjukan ataupun seni lainnya, materi seni harus sesuai kejiwaan siswa. 4); keseluruhan dari puncak hasil pengajaran selama latihan / belajar, hendaknya dapat dipamerkan/dipentaskan. Indikator dari semua potensi tersebut adalah, memberikan aura positif bagi siswa terutama rasa suka siswa menerima pelajaran, khususnya dalam praktek seni dan budaya.

Mengampu pelajaran seni budaya dibutuhkan rasa kesabaran, juga keakraban dengan siswanya. Di mana notabene sebuah kesenian dalam sejarahnya selalu berhubungan dengan "rasa"

mengajar dan melatih.

Mendidik, berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar, berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sedangkan melatih, berarti mengembangkan ketrampilan pada siswa. Bahkan lebih dari itu konon guru juga mengarahkan, menilai, serta mengevaluasi siswanya, bahkan memberi teladan dalam perilaku sehari-hari. Materi yang menarik dengan pengandaian, mudah penyampaianya kepada siswa, mudah dipahami, sehingga siswa merasa senang untuk menerima materi yang diajarkan, sehingga bahan ajar disesuaikan dengan usia siswa didik tentunya.

Situasi demikian sesuai pandangan Mahmud (1995), bahwa implementasi dalam belajar seni budaya, adalah menuntun siswa agar dapat mendorong gerak pikir dan rasa, membangkitkan kekuatan jiwa, membentuk watak seseorang. Salah satunya dengan membiasakan budaya ngajeni, agar berdampak nyata membentuk etik serta adab dalam kehidupan sehari-hari menyongsong Indonesia emas. Semoga. (*)-d

**)Danan Murdyantoro SSn, Guru Kursus Karawitan di PML Kotabaru Yogyakarta.*

Pojok KR

Dalam tiga bulan terakhir, korban scam rugi Rp 700 miliar.

- Itu baru yang dilaporkan.

Bareskrim sita 263 dokumen terkait pagar laut.
- Yang terlibat keburu kabur.

Puskesmas di Yogya mulai layani cek kesehatan gratis.

- Diharapkan berkesinambungan.

Berabe